

Mendikbud Ajak Pemerintah Daerah Lakukan Investasi Pendidikan

Kamis, 23-02-2017

MUHAMMADIYAH.OR.ID, AMBON – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, menegaskan komitmen pemerintah dalam mengalokasikan 20% anggaran untuk fungsi pendidikan. Muhadjir mengajak pemerintah daerah untuk bersama-sama berinvestasi memajukan pendidikan.

"Kemendikbud hanya mengelola sembilan persen dari total dua puluh persen anggaran fungsi pendidikan dari APBN," kata Muhadjir, dalam acara Pra Tanwir Muhammadiyah "Seminar Akselerasi Mutu Pendidikan di Kawasan Indonesia Timur", Kamis (23/2) bertempat di Gedung Islamic Center Ambon.

Muhadjir menjelaskan bahwa 60% alokasi fungsi pendidikan di APBN disalurkan ke daerah dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). "Tidak banyak daerah yang mengalokasikan anggaran untuk pendidikan sebesar 20%. Yang saya maksudkan di sini adalah anggaran murni tanpa dicampur dengan dana transfer dari pusat," kata Muhadjir.

Kembali dijelaskan Muhadjir, perludanya kerja sama yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memajukan pendidikan. Dalam kesempatan tersebut Muhadjir menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah daerah di Maluku yang terpantau cukup aktif membangun sumber daya manusia melalui pendidikan.

Kerja sama pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat penting. Saat ini pemerintah pusat tengah berupaya meningkatkan akses pada layanan pendidikan agar mengurangi kesenjangan. Melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP), pemerintah ingin menjamin anak-anak dapat terus belajar dan bersekolah. Diungkapkannya, saat ini KIP juga diberikan kepada anak-anak yatim piatu dan penghuni panti asuhan.

Selain itu, pendidikan karakter dan revitalisasi pendidikan vokasi menjadi fokus pengembangan Sumber Daya Manusia yang unggul, produktif, berkualitas dan berkarakter. "Khusus untuk Maluku, kita akan mengembangkan pendidikan kejuruan berbasis kelautan," tutur Muhadjir.

Terkait dengan rencana eksplorasi Blok Masela, Muhadjir menyampaikan rencana pemerintah untuk menyiapkan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang terkait erat dengan industri eksplorasi tersebut.

"Kita harap nantinya SMK tersebut bisa menyediakan tenaga-tenaga produktif untuk ikut mengelola Blok Masela," jelas Muhadjir. **(adam)**